



**PERUBAHAN**  
**RENCANA KERJA**  
**TAHUN 2024**



**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KOTA BATAM**



## **KATA PENGANTAR**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Batam disusun sebagai bahan pedoman perubahan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 karena adanya beberapa perubahan rencana kerja yang telah ditetapkan pada prioritas pembangunan yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sehingga diharapkan program dan kegiatan-kegiatan di Dinas Perhubungan dapat tetap memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kota Batam secara signifikan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan menjadi acuan seluruh Bidang dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya dan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

**Batam, 19 Agustus 2024**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BATAM**



**SALIM, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda

**NIP.19681021 199010 1 001**

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>ii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |           |
| 1.1. Latar Belakang .....   | 1         |
| 1.2. Landasan Hukum .....   | 2         |
| 1.3. Maksud dan Tujuan.....   | 9         |
| 1.4. Sistematika Penulisan.....   | 10        |
| <b>BAB II EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN<br/>KOTA BATAM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II<br/>TAHUN 2024.....</b> | <b>11</b> |
| <b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN<br/>DINAS PERHUBUNGAN</b>  |           |
| 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan ...  | 20        |
| 3.2. Perubahan Belanja Dinas Perhubungan Tahun 2024 .....   | 21        |
| 3.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....   | 28        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>37</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|   | Hal |
|---|-----|
| II.1 Target dan Realisasi Anggaran per Program s.d TW II Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Batam .....          | 11  |
| II.2. Evaluasi Hasil Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Batam.....               | 13  |
| III.1. Penyesuaian Target Tujuan dan Sasaran Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam TA 2024.....                    | 20  |
| III.2. Data Kegiatan/Sub Kegiatan Tunda Bayar Tahun 2023 Finas Perhubungan.....                                 | 22  |
| III.3. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Batam ..... | 29  |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

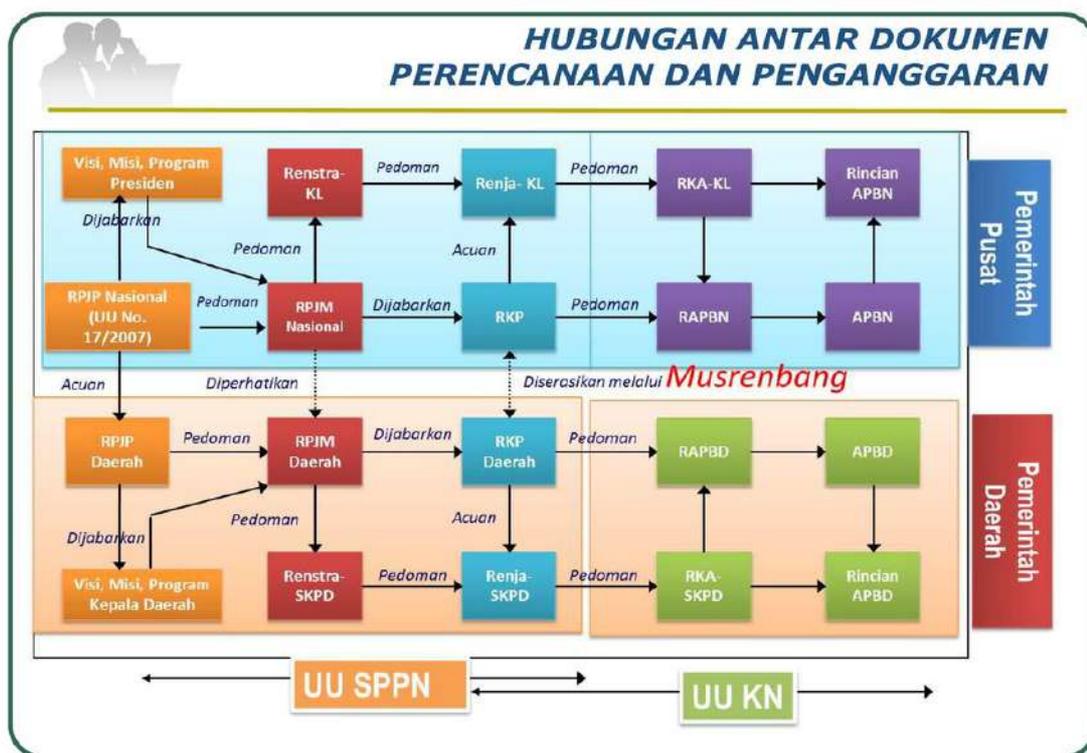
Perubahan Renja adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang dilatarbelakangi oleh adanya pergeseran atau penambahan dan pengurangan anggaran. Perubahan Renja Tahun 2024 memuat perubahan pagu anggaran, perubahan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan. Perubahan Renja Tahun 2024 disusun sebagai bahan acuan penyusunan Perubahan RKA Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun Anggaran 2024.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Dinas Perhubungan Kota Batam perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2024; dan/atau

- Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).



## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam adalah :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang

- Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  - 7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - 8) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - 9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- 10) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  - 11) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  - 12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) ;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 22) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 23) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
- 24) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 26) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 33) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

- 35) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 36) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
- 37) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
- 38) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
- 39) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
- 40) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87);

- 41) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
- 42) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
- 43) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
- 44) Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 862);
- 45) Peraturan Walikota Batam Nomor 224 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1092);
- 46) Peraturan Walikota Batam Nomor 84 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Batam Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1424);

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2024 adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program/kegiatan.

### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024:

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan) serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
2. sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Dinas Perhubungan;
3. menjaga konsistensi capaian kinerja Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1.Latar Belakang

1.2.Landasan Hukum

1.3.Maksud dan Tujuan

1.4.Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

#### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI RENCANA KERJA**

#### **DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**

#### **SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun 2024 dan juga memperhatikan dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dimana indikator program dan target renstra telah mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah periode 2021-2026.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2024 penyerapan anggaran Dinas Perhubungan Kota Batam masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Dengan pagu pada APBD sebesar Rp.86.978.544.499,- baru terealisasi sebesar Rp.23.740.160.595,00 atau sekitar 28% sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II.1**  
**Target dan Realisasi Anggaran per Program s.d TW II Tahun 2024**  
**Dinas Perhubungan Kota Batam**

| PROGRAM |   | PAGU RKPD<br>2024<br>Rp  | PAGU APBD<br>2024<br>Rp  | REALISASI S.D<br>TW II 2024<br>Rp | %<br>PENYERAPAN<br>ANGGARAN |
|---------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1       | Pogram Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 29.171.163.448,00        | 31.910.581.765,00        | 12.810.599.503,00                 | 40%                         |
| 2       | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 37.345.152.912,00        | 42.507.170.950,00        | 8.968.730.922,00                  | 21%                         |
| 3       | Program Pengelolaan Pelayaran                                 | 19.152.711.564,00        | 12.560.791.784,00        | 1.960.830.170,00                  | 16%                         |
|         |   | <b>85.669.027.924,00</b> | <b>86.978.544.499,00</b> | <b>23.740.160.595,00</b>          | <b>27%</b>                  |

Hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 adalah sebagaimana tabel II.2 berikut :

**Tabel II.2**  
**EVALUASI HASIL CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN RENJA DAN RENSTRA**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024**

| KODE              | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM                      | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                    | CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA) |         | REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023 |         | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 |                   | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 |                   | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TRIWULAN TAHUN 2024 |                   |            |                  | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 |                  | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 |                | KETERANGAN |         |  |
|-------------------|---|---|--|---------|--|---------|---|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|------------|------------------|--|------------------|---|----------------|------------|---------|--|
|                   |   |   | SATUAN   | KINERJA | Rp.                                      | SATUAN  | KINERJA   | Rp.               | KINERJA  | Rp.               | KINERJA  | Rp.               | TRIWULAN I |                  | TRIWULAN II  |                  | KINERJA   | Rp.            |            | KINERJA | Rp.  |
|                   |   |   |  |         |  |         |   |                   |  |                   |  |                   |            |                  |  |                  |   |                |            |         |  |
| 1                 | 2   | 3   | 4  |         | 5  |         | 6   |                   | 7  |                   | 8  |                   | 9          |                  | 10 = 8 + 9   |                  | 11  |                | 12         |         |  |
| 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |  |         |  |         |   |                   |  |                   |  |                   |            |                  |  |                  |   |                |            |         |  |
| 2.15              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                |   |  |         |  |         |   |                   |  |                   |  |                   |            |                  |  |                  |   |                |            |         |  |
| 2.15.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah                        | Persen   | 100     | 177.845.828.063,00                       | Persen  | 100   | 64.303.973.041,44 | 100  | 29.171.163.448,00 | 100  | 31.910.581.765,00 | 26         | 4.661.576.460,00 |  | 8.149.023.043,00 | 0   | 12.810.599.503 | 0%         | 44%     |  |
| 2.15.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi                    | Persen   | 100     | 79.971.786.734,00                        | Persen  | 100   | 34.307.882.227,00 | 100  | 13.462.615.876,00 | 100  | 13.873.924.905,00 | 18         | 2.409.707.068,00 |  | 5.276.019.305,00 | 0   | 7.685.726.373  | 0%         | 57%     |  |
| 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | Orang/ Bulan   | 73      | 79.149.677.734,00                        | Orang   | 75  | 33.846.022.227,00 | 73   | 13.278.295.876,00 | 75   | 13.873.924.905,00 | 75         | 2.409.707.068,00 |  | 5.276.019.305,00 | 0   | 7.685.726.373  | 0%         | 58%     |  |
| 2.15.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                 | Kegiatan   | 15      | 822.109.000,00                           | Dokumen | 32  | 461.860.000,00    | 32   | 184.320.000       | -  | -                 | 0          | -                |  | -                | 0   | -              | 0%         | 0%      | Sub Kegiatan dialihkan ke Gaji/Tunjangan, Materi dialihkan ke sub kegiatan           |
| 2.15.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana                | Persen   | 100     | 764.696.000,00                           | Persen  | 100   | 0,00              | 100  | 227.700.000,00    | -  | 0,00              | 0          | 0,00             | 0  | 0,00             | 0   | 0,00           | 0%         | 0%      |  |
| 2.15.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | Stell  | 320     | 488.320.000,00                           |         |   | 0,00              | 150  | 178.200.000,00    | -  | 0,00              | 0          | 0,00             | 0  | 0,00             | 0   | -              | 0%         | 0%      | Tidak menjadi kegiatan prioritas Dishub  |
| 2.15.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang  | 40      | 276.376.000,00                           |         |   | 0,00              | 5  | 49.500.000,00     | -  | 0,00              | 0          | 0,00             | 0  | 0,00             | 0   | -              | 0%         | 0%      | Tidak adanya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dari Kemenhub untuk Tenaga |

| KODE              | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM                  | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN   | CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA) |         |                  | REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023 |         |                | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 |                | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 |                | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TRIWULAN TAHUN 2024 |     |             |     | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 |     | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 |      | KETERANGAN |         |
|-------------------|---|--|--|---------|------------------|--|---------|----------------|---|----------------|--|----------------|--|-----|-------------|-----|--|-----|---|------|------------|---------|
|                   |   |  | SATUAN   | KINERJA | Rp.              | SATUAN                                   | KINERJA | Rp.            | KINERJA   | Rp.            | KINERJA  | Rp.            | TRIWULAN I   |     | TRIWULAN II |     | KINERJA  | Rp. | KINERJA   | Rp.  |            |         |
|                   |   |  |  |         |                  |  |         |                |   |                |  |                | KINERJA  | Rp. | KINERJA     | Rp. |  |     |   |      |            | KINERJA |
| 1                 | 2   | 3  | 4  |         |                  | 5  |         |                | 6   |                | 7  |                | 8  |     |             |     | 9  |     | 10 = 8 + 9  | 11   | 12         |         |
| 2.15.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah                                   | Persen   | 100     | 1.526.986.136,00 | Persen                                   | 85      | 773.630.739,00 |   | 527.770.700,00 | 100  | 451.132.700,00 | 7  |     | 0,00        |     | 60.390.069,00  | 0   | 60.390.069,00   | 0%   | 11%        |         |
| 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan         | Paket  | 5       | 324.395.500,00   | Paket                                    | 7       | 200.721.000,00 | 1   | 255.830.200,00 | 3  | 255.830.200,00 | 0  |     | 0,00        | 1   | 5.140.000,00   | 1   | 5.140.000,00  | 100% | 2%         |         |
| 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                             | Paket  | 5       | 529.535.136,00   | Paket                                    | 15      | 249.982.000,00 | 5   | 103.292.500,00 | 5  | 83.143.500,00  | 0  |     | 0,00        | 1   | 17.980.000,00  | 1   | 17.980.000,00   | 20%  | 17%        |         |
| 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Paket  | 5       | 219.199.000,00   | Paket                                    | 3       | 182.605.000,00 | 1   | 8.250.000,00   | 1  | 38.250.000,00  | 0  |     | 0,00        | 1   | 10.000.000,00  | 1   | 10.000.000,00   | 100% | 121%       |         |
| 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                  | Paket  | 5       | 130.856.500,00   | Paket                                    | 3       | 71.869.400,00  | 1   | 24.608.000,00  | 2  | 24.608.000,00  | 0  |     | 0,00        | 1   | 21.200.000,00  | 1   | 21.200.000,00   | 100% | 86%        |         |
| 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                        | Laporan  | 35      | 323.000.000,00   | Kali                                     | 60      | 68.453.339,00  | 35  | 135.790.000,00 | 25   | 49.301.000,00  | 0  |     | 0,00        | 3   | 6.070.069,00   | 3   | 6.070.069,00  | 9%   | 4%         |         |
| 2.15.01.2.07.     | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi | Persen   | 100     | 1.508.143.012,00 | Persen                                   | 100     | 722.465.328,00 |   | 834.647.000,00 | 100  | 109.854.000,00 | 7,5  |     | 0,00        |     | 51.900.000,00  | 0   | 51.900.000,00   | 0%   | 6%         |         |
| 2.15.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | Unit   | 223     | 505.520.000,00   |  | 6       | 84.200.000,00  | 51  | 303.876.000,00 | 1 Unit   | 36.354.000,00  | 0  |     | 0,00        | 1   | 0,00   | 1   | -   | 2%   | 0%         |         |
| 2.15.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                    | Unit   | 5       | 890.623.012,00   | Unit                                     | 68      | 546.500.000,00 | 56  | 530.771.000,00 | 7 Unit   | 73.500.000,00  | 0  |     | 0,00        | 3   | 51.900.000,00  | 3   | 51.900.000,00   | 5%   | 10%        |         |
| 2.15.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan yang Disediakan                                    | Unit   | 1       | 112.000.000,00   |  | 1       | 91.765.328,00  |   |                |  |                |  |     |             |     |  |     |   |      |            |         |

| KODE              | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM  | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN   | CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA) |         |                   | REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023 |         |                  | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 |                  | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 |                  | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TRIWULAN TAHUN 2024 |                |             |                | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 |                  | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 |     | KETERANGAN |
|-------------------|---|--|--|---------|-------------------|--|---------|------------------|---|------------------|--|------------------|--|----------------|-------------|----------------|--|------------------|---|-----|------------|
|                   |   |  | SATUAN   | KINERJA | Rp.               | SATUAN                                   | KINERJA | Rp.              | KINERJA   | Rp.              | KINERJA  | Rp.              | TRIWULAN I   |                | TRIWULAN II |                | KINERJA  | Rp.              | KINERJA   | Rp. |            |
|                   |   |  |  |         |                   |  |         |                  |   |                  |  |                  | KINERJA  | Rp.            | KINERJA     | Rp.            |  |                  |   |     |            |
| 1                 | 2   | 3  | 4  |         |                   | 5  |         |                  | 6   |                  | 7  |                  | 8  |                |             |                | 10=8+9   |                  | 11  | 12  |            |
| 2.15.01.2.08.     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi                          | Persen   | 100     | 16.551.147.100,00 | Persen                                   | 100     | 7.538.887.732,00 | 100   | 2.865.038.376,00 | 100  | 2.564.640.160,00 | 24   | 573.885.807,00 |             | 638.785.303,00 | 0  | 1.212.671.110,00 | 0%  | 42% |            |
| 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Laporan  | 60      | 5.419.451.500,00  | Laporan                                  | 36      | 2.146.597.831,00 | 48  | 994.415.000,00   | 12   | 897.199.000,00   | 3  | 200.343.109,00 | 6           | 199.134.501,00 | 6  | 399.477.610      | 13%   | 40% |            |
| 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Laporan  | 65      | 11.131.695.600,00 | laporan                                  | 39      | 5.392.289.901,00 | 13  | 1.870.623.376,00 | 13   | 1.667.441.160,00 | 3  | 373.542.698,00 | 3           | 439.650.802,00 | 3  | 813.193.500      | 23%   | 43% |            |
| 2.15.01.2.09.     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi     | Persen   | 100     | 5.339.762.464,00  | Persen                                   | 97      | 2.017.056.945,00 |   | 917.610.000,00   | 100  | 818.230.000,00   | 9  | 61.179.000,00  |             | 97.456.000,00  | 0  | 158.635.000,00   | #DIV/0!   | 17% |            |
| 2.15.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit   | 1       | 126.120.000,00    |  |         | 0,00             | 1   | 38.280.000,00    | 1  | 38.280.000,00    | 1  | 5.623.200,00   | 1           | 3.960.000,00   | 1  | 9.583.200        | 100%  | 25% |            |
| 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit   | 99      | 3.802.687.000,00  | Unit                                     | 185     | 1.420.950.400,00 | 98  | 599.350.000,00   | 79   | 599.350.000,00   | 9  | 54.805.800,00  | 15          | 92.746.000,00  | 15   | 147.551.800      | 15%   | 25% |            |
| 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Jenis  | 200     | 211.200.000,00    | Unit                                     | 11      | 48.769.000,00    | 61  | 78.600.000,00    | 60   | 40.600.000,00    | 0  | 0,00           | 0           | 0,00           | 0  | -                | 0%  | 0%  |            |
| 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                               | Jenis  | 1       | 1.199.755.464,00  | Unit                                     | 1       | 547.337.545,00   | 1   | 201.380.000,00   | 1  | 140.000.000,00   | 1  | 750.000,00     |             | 750.000,00     | 0  | 1.500.000        | 0%  | 1%  |            |

| KODE              | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM                  | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN  | CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA) |  |                    | REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023 |   |                   | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 |                   | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 |                   | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TRIWULAN TAHUN 2024 |                  |  |                  | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 |                  | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 |     | KETERANGAN |    |
|-------------------|---|--|--|--|--------------------|--|---|-------------------|---|-------------------|--|-------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|---|-----|------------|----|
|                   |   |  | SATUAN   | KINERJA  | Rp.                | SATUAN                                   | KINERJA                                     | Rp.               | KINERJA   | Rp.               | KINERJA  | Rp.               | TRIWULAN I   |                  | TRIWULAN II                                |                  | KINERJA  | Rp               | KINERJA   | Rp  |            |    |
|                   |   |  |  |  |                    |  |   |                   |   |                   |  |                   | KINERJA  | Rp.              | KINERJA                                    | Rp.              |  |                  |   |     |            |    |
| 1                 | 2   | 3  | 4  |  |                    | 5  |   |                   | 6   |                   | 7  |                   | 8  |                  |  |                  | 9  |                  | 10=8+9  |     | 11         | 12 |
| 2.15.01.2.10.     | Peningkatan Pelayanan BLUD  | persentase pelayanan BLUD  | Persen   | 100  | 72.183.306.617,00  | Persen                                   | 80  | 18.944.050.070,44 | 100   | 10.335.781.496,00 | 100  | 14.092.800.000,00 | 80   | 1.616.804.585,00 |  | 2.024.472.366,00 | 0  | 3.641.276.951,00 | 0%  | 35% |            |    |
| 2.15.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                            | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   | Unit Kerja   | 1  | 72.183.306.617,00  | Unit Kerja                               | 1   | 18.944.050.070,44 | 1   | 10.335.781.496,00 | 1  | 14.092.800.000,00 | 1  | 1.616.804.585,00 | 1  | 2.024.472.366,00 | 1  | 3.641.276.951    | 100%  | 35% |            |    |
| 2.15.02.          | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)     | 1. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun<br>2. Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun<br>3. Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai<br>4. Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji<br>5. Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam | 1. Persen<br>2. Unit<br>3. Orang<br>4. Persen<br>5. Persen | 1. 100<br>2. 5.211<br>3. 400<br>4. 80<br>5. 63 | 215.064.171.924,00 | Persen                                   | 1. 56<br>2. 2.924<br>3. 0<br>4. 53<br>5. 23 | 68.216.989.734,64 | 1. 81<br>2. 4.199<br>3. 200<br>4. 78<br>5. 41                               | 37.345.152.912,00 | 1. 81<br>2. 4.199<br>3. 200<br>4. 78<br>5. 41                              | 42.507.170.950,00 | 1. 56<br>2. 2.924<br>3. -<br>4. 13<br>5. 5                 | 4.855.698.817,00 | 1. 56<br>2. 2.924<br>3. -<br>4. 10<br>5. 6 | 4.113.032.105,00 | 1. 56<br>2. 2.924<br>3. -<br>4. 23<br>5. 11  | 8.968.730.922,00 | 1. 69<br>2. 69<br>3. 0<br>4. 29<br>5. 27                        | 24% |            |    |
| 2.15.02.2.01      | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota              | Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun   | Persen   | 100  | 951.527.900,00     |  |   | 0,00              | 100   | 900.000.000,00    |  | 900.000.000,00    | 0  | 0,00             | 0  | 0,00             | 0  | 0,00             | 0%  | 0%  |            |    |
| 2.15.02.2.01.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota   | Dokumen  | 1  | 951.527.900,00     |  |   | 0,00              | 1   | 900.000.000,00    | 1  | 900.000.000,00    | 0  | 0,00             | 0  | 0,00             | 0  | -                | 0%  | 0%  |            |    |
| 2.15.02.2.02.     | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota             | Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya  | Persen   | 100  | 24.271.797.880,00  | Persen                                   | 100   | 3.555.309.338,00  | 100 %   | 3.288.571.400,00  | 100  | 943.959.400,00    | 5  | 17.630.000,00    | 25   | 64.310.000,00    | 30   | 81.940.000,00    | 0%  | 2%  |            |    |
| 2.15.02.2.02.0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota               | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun  | Unit   | 38   | 5.911.932.460,00   | Unit                                     | 1   | 688.099.266,00    | 6   | 631.201.200,00    | 2  | 203.609.600,00    | -  | 0,00             |  | 0,00             | 0  | -                | 0%  | 0%  |            |    |

| KODE              | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM   | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN  | CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA) |            |                          | REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023 |           |                         | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 |                         | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 |                         | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TRIWULAN TAHUN 2024 |                       |             |                       | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 |                       | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 |            | KETERANGAN |    |
|-------------------|--|--|--|------------|--------------------------|--|-----------|-------------------------|---|-------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|--|-----------------------|---|------------|------------|----|
|                   |  |  | SATUAN   | KINERJA    | Rp.                      | SATUAN                                   | KINERJA   | Rp.                     | KINERJA   | Rp.                     | KINERJA  | Rp.                     | TRIWULAN I   |                       | TRIWULAN II |                       | KINERJA  | Rp.                   | KINERJA   | Rp.        |            |    |
|                   |  |  |  |            |                          |  |           |                         |   |                         |  |                         | KINERJA  | Rp.                   | KINERJA     | Rp.                   |  |                       |   |            |            |    |
| 1                 | 2  | 3  | 4  |            |                          | 5  |           |                         | 6   |                         | 7  |                         | 8  |                       |             |                       | 9  |                       | 10=8+9  |            | 11         | 12 |
| 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota  | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia  | Unit   | 1.282      | 14.964.842.620,00        | Unit                                     | 268       | 1.570.290.555,00        | 281   | 1.065.728.000,00        | 183  | 490.447.800,00          | -  | 0,00                  |             | 37.020.000,00         | 0  | 37.020.000            | 0%  | 3%         |            |    |
| 2.15.02.2.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan  | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara   | Unit   | 64         | 1.697.511.400,00         | Unit                                     | 15        | 503.103.117,00          | 11  | 1.091.683.200,00        | -  | 0,00                    | -  | 0,00                  |             | 0,00                  | 0  | -                     | 0%  | 0%         |            |    |
| 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan   | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara  | Unit   | 409        | 1.697.511.400,00         | Unit                                     | 67        | 793.816.400,00          | 60  | 499.959.000,00          | 10   | 249.902.000,00          | -  | 17.630.000,00         |             | 27.290.000,00         | 0  | 44.920.000            | 0%  | 9%         |            |    |
| 2.15.02.2.04.     | <b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>  | <b>Persentase Titik Parkir yang dikelola</b>   | <b>Persen</b>  | <b>100</b> | <b>51.361.917.100,00</b> | <b>persen</b>                            | <b>70</b> | <b>4.190.553.706,00</b> | <b>91</b>   | <b>5.458.019.500,00</b> | <b>91</b>  | <b>7.202.828.000,00</b> | <b>72</b>  | <b>194.750.308,00</b> | <b>72</b>   | <b>783.737.704,00</b> | <b>72</b>  | <b>978.488.012,00</b> | <b>79%</b>  | <b>18%</b> |            |    |
| 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan  | 720        | 51.361.917.100,00        | laporan                                  | 598       | 4.190.553.706,00        | 658   | 5.458.019.500,00        | 658  | 7.202.828.000,00        | 3  | 194.750.308,00        | 3           | 783.737.704,00        | 6  | 978.488.012           | 0%  | 18%        |            |    |
| 2.15.02.2.05.     | <b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>  | <b>Peresentase Operasional Pelayanan PKB</b>   | <b>Persen</b>  | <b>73</b>  | <b>14.492.849.000,00</b> | <b>Persen</b>                            | <b>64</b> | <b>2.378.006.700,00</b> | <b>67</b>   | <b>960.074.000,00</b>   | <b>78</b>  | <b>610.074.000,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b>           | <b>29</b>   | <b>125.000.000,00</b> | <b>29</b>  | <b>125.000.000,00</b> | <b>43%</b>  | <b>13%</b> |            |    |
| 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia   | Unit   | 84         | 10.343.382.000,00        | Unit                                     | 11        | 377.496.500,00          | 11  | 510.074.000,00          | 1  | 160.074.000,00          | 0  | 0,00                  |             | 0,00                  | 0  | -                     | 0%  | 0%         |            |    |
| 2.15.02.2.05.0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | Dokumen  | 72.000     | 1.800.000.000,00         | Dokumen                                  | 36.000    | 900.000.000,00          | 5.000   | 125.000.000,00          | 5000   | 125.000.000,00          | 0  | 0,00                  | 5.000       | 125.000.000,00        | 5000   | 125.000.000           | 100%  | 100%       |            |    |
| 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara  | Unit   | 4          | 2.349.467.000,00         | Unit                                     | 3         | 1.100.510.200,00        | 2   | 325.000.000,00          | 3  | 325.000.000,00          | 0  | 0,00                  |             | 0,00                  | 0  | -                     | 0%  | 0%         |            |    |

| KODE              | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM  | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN  | CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA) |         |                   | REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023 |         |                   | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 |                   | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 |                   | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TRIWULAN TAHUN 2024 |                  |             |                  | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 |                  | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 |     | KETERANGAN |
|-------------------|---|--|--|---------|-------------------|--|---------|-------------------|---|-------------------|--|-------------------|--|------------------|-------------|------------------|--|------------------|---|-----|------------|
|                   |   |  | SATUAN   | KINERJA | Rp.               | SATUAN                                   | KINERJA | Rp.               | KINERJA   | Rp.               | KINERJA  | Rp.               | TRIWULAN I   |                  | TRIWULAN II |                  | KINERJA  | Rp               | KINERJA   | Rp  |            |
|                   |   |  |  |         |                   |  |         |                   |   |                   |  |                   | KINERJA  | Rp.              | KINERJA     | Rp.              |  |                  |   |     |            |
| 1                 | 2   | 3  | 4  | 5       | 6                 | 7  | 8       | 9                 | 10  | 11                | 12   | 13                | 14   | 15               | 16          | 17               | 18   | 19               | 20  | 21  |            |
| 2.15.02.2.06.     | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota  | Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota   | Persen   | 100     | 40.950.656.834,00 | Persen                                   | 56      | 11.279.965.267,64 | 85  | 8.312.627.400,00  | 85   | 5.481.171.200,00  | 56   | 0,00             | 56          | 236.367.500,00   | 56   | 236.367.500,00   | 66%   | 3%  |            |
| 2.15.02.2.06.0013 | Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)   | Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)  | Unit   | 3       | 698.719.900,00    |  |         | 0,00              | 2   | 131.515.200,00    | 1  | 133.604.700,00    | 0  | 0,00             | 1           | 10.220.000,00    | 1  | 10.220.000       | 50%   | 8%  |            |
| 2.15.02.2.06.0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas  | Jumlah Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan                        | Dokumen  | 60      | 40.251.936.934,00 | Dokumen                                  | 2       | 11.279.965.267,64 | 4   | 8.181.112.200,00  | 2  | 5.347.566.500,00  | 0  | 0,00             | 1           | 226.147.500,00   | 1  | 226.147.500      | 25%   | 3%  |            |
| 2.15.02.2.08      | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan  | Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas   | Persen   | 100     | 1.694.669.090,00  | Persen                                   | 100     | 455.180.000,00    | 100 %   | 194.400.000,00    | 100  | 153.600.000,00    | 19   | 0,00             | 9           | 0,00             | 28   | 0,00             | 0%  | 0%  |            |
| 2.15.02.2.08.0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Laporan  | 366     | 1.694.669.090,00  | Laporan                                  | 210     | 455.180.000,00    | 40  | 194.400.000,00    | 32   | 153.600.000,00    | 6  | 0,00             | 3           | 0,00             | 9  | -                | 0%  | 0%  |            |
| 2.15.02.2.09      | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                      | Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)  | Persen   | 100     | 81.340.754.120,00 | Persen                                   | 80      | 46.357.974.723,00 | 100   | 18.231.460.612,00 | 90   | 27.215.538.350,00 | 80   | 4.643.318.509,00 | 90          | 2.903.616.901,00 | 90   | 7.546.935.410,00 | 90%   | 41% |            |
| 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                      | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia        | Unit   | 67      | 81.340.754.120,00 | Unit                                     | 45      | 46.357.974.723,00 | 48 Unit   | 18.231.460.612,00 | 42   | 27.215.538.350,00 | 48   | 4.643.318.509,00 | 48          | 2.903.616.901,00 | 48   | 7.546.935.410    | 0%  | 41% |            |

| KODE              | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM  | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN  | CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA) |         |                   | REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023 |         |                   | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 |                   | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 |                   | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TRIWULAN TAHUN 2024 |                |             |                  | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 |                  | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 |     | KETERANGAN |
|-------------------|---|---|--|---------|-------------------|--|---------|-------------------|---|-------------------|--|-------------------|--|----------------|-------------|------------------|--|------------------|---|-----|------------|
|                   |   |   | SATUAN   | KINERJA | Rp.               | SATUAN                                   | KINERJA | Rp.               | KINERJA   | Rp.               | KINERJA  | Rp.               | TRIWULAN I   |                | TRIWULAN II |                  | KINERJA  | Rp.              | KINERJA   | Rp. |            |
|                   |   |   |  |         |                   |  |         |                   |   |                   |  |                   | KINERJA  | Rp.            | KINERJA     | Rp.              |  |                  |   |     |            |
| 1                 | 2   | 3   | 4  |         |                   | 5  |         |                   | 6   |                   | 7  |                   | 8  |                | 9           |                  | 10 = 8 + 9   |                  | 11  |     | 12         |
| 2.15.03.          | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN   | Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di wilayah hinterland   | Persen   | 49      | 47.100.733.814,00 | Persen                                   | 43      | 13.069.517.450,00 |   | 19.152.711.564,00 | 49   | 12.560.791.784,00 | 9  | 733.094.680,00 | 10          | 1.227.735.490,00 | 19   | 1.960.830.170,00 | 0%  | 10% |            |
| 2.15.03.2.06      | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota   | Persentase pulau yang terlayani oleh transportasi laut  | Persen   | 100     | 9.769.737.748,00  | Persen                                   | 67      | 4.601.528.264,00  | 100   | 2.072.630.064,00  | 100  | 3.656.394.784,00  | 67   | 733.094.680,00 | 67          | 846.820.120,00   | 67   | 1.579.914.800,00 | 67%   | 76% |            |
| 2.15.03.2.06.0004 | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | Laporan  | 60      | 9.769.737.748,00  | Laporan                                  | 12      | 4.601.528.264,00  | 48  | 2.072.630.064,00  | 12   | 3.656.394.784,00  | 3  | 733.094.680,00 | 3           | 846.820.120,00   | 6  | 1.579.914.800    | 13%   | 76% |            |
| 2.15.03.2.12      | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal  | Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik  | Persen   | 100     | 37.330.996.066,00 | Persen                                   | 67      | 8.467.989.186,00  | 100   | 17.080.081.500,00 | 100  | 8.904.397.000,00  | 6  | 0,00           | 23          | 380.915.370,00   | 29   | 380.915.370,00   | 29%   | 2%  |            |
| 2.15.03.2.12.0002 | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal   | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun  | Unit   | 10      | 33.628.994.550,00 | Ponton                                   | 3       | 5.668.192.895,00  | 8   | 15.375.258.400,00 | 2  | 8.584.946.400,00  | 0  | 0,00           | 0           | 380.915.370,00   | 0  | 380.915.370      | 0%  | 2%  |            |
| 2.15.03.2.12.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal  | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara  | Unit   | 33      | 3.702.001.516,00  | Dermaga                                  | 12      | 2.799.796.291,00  | 4   | 1.704.823.100,00  | 2  | 319.450.600,00    | 0  | 0,00           | 0           | 0,00             | 0  | -                | 0%  | 0%  |            |

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam sampai Triwulan II tahun 2024 sebagaimana yang tertera pada tabel II.2 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Hampir semua pekerjaan fisik masih terealisasi dibawah 50% pada laporan Triwulan II Tahun 2024, mengingat kegiatan tahun 2024 ini masih berlangsung, bahkan beberapa pekerjaan masih dalam tahap pelaksanaan pengadaan dan kontrak.
2. Banyak usulan-usulan masyarakat hasil dari Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) yang tidak dapat terakomodir yang disebabkan karena adanya kebijakan pembatasan pelaksanaan kegiatan dan pengendalian belanja yang tentu saja berakibat terhadap target RPJMD yang tidak dapat tercapai sebagaimana yang telah diamanatkan kepada Dinas Perhubungan Kota Batam dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan tidak terlalu berdampak signifikan. Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 terdiri dari tunda bayar pekerjaan tahun 2023 dan tambah kurang terhadap pekerjaan yang harus dikerjakan berdasarkan hasil review dan evaluasi oleh Kepala Dinas dan Bidang-bidang. yang mendapat tanggapan positif oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya dituangkan pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Batam.

## BAB III

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

#### DINAS PERHUBUNGAN

#### 3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN

Sebagaimana yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 Dinas Perhubungan pada RPJMD 2021-2026 mengemban misi ke 2 yaitu ‘mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan’ dan misi ke 4 yaitu ‘meningkatkan pembangunan infrastruktur dan transportasi perhubungan di wilayah hinterland’.

Berdasarkan kedua misi tersebut ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan yaitu :

**Tabel III.1**  
**PENYESUAIAN TARGET TUJUAN DAN SASARAN KERJA**  
**DINAS PERHUBUNGAN TA 2024**

| MISI WALIKOTA  | TUJUAN DINAS PERHUBUNGAN   | SASARAN DINAS PERHUBUNGAN   | INDIKATOR KINERJA SASARAN  | TARGET     |                |
|--|--|---|--|------------|----------------|
|  |  |   |  | RENJA 2024 | RENJA - P 2024 |
| Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan | Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman           | Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman | INDIKATOR SASARAN:<br>Persentase sarana prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di perkotaan   | 81%        | 81%            |
|  |  |   | INDIKATOR SASARAN:<br>Persentase tersedianya angkutan umum yang layak yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota | 44%        | 44%            |
| Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan transportasi perhubungan di wilayah hinterland                          | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi Perhubungan di wilayah hinterland              | Tersedianya sarana dan prasarana transportasi di wilayah hinterland             | Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di wilayah hinterland  | 91%        | 91%            |
| Tersedianya Aparatur yang profesional dan handal   | Mewujudkan dan meningkatkan sumber daya manusia perhubungan yang memadai secara kualitas dan kuantitas | Tersedianya Aparatur yang profesional dan handal                                | Persentase Pelayanan Administrasi, sarana dan Prasarana Perkantoran yang terpenuhi   | 100%       | 100%           |

Memperhatikan tabel III.1 penyesuaian target tujuan dan sasaran Perubahan RENJA tahun 2024 menunjukkan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam tidak mengalami perubahan.

Dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan lagi dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan. Sehingga target indikator program, kegiatan dan sub kegiatan otomatis mendukung tercapainya indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

### **3.2. PERUBAHAN BELANJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2024**

Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ada beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Batam yang mengalami penambahan dan pengurangan. Total pagu dana dalam renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam menjadi Rp.90.376.458.117,00 atau naik sebesar 5% dari pagu dana Rencana Kerja Tahun 2024 yaitu sebesar Rp.85.669.027.924,00 namun dibandingkan dengan pagu APBD Murni Tahun 2023 naik sebesar 4% dari pagu dana sebesar Rp.86.978.544.499,00.

Dari total pagu penambahan sebesar Rp.4.707.430.193,- terdapat tunda bayar terhadap pekerjaan tahun 2023 sebesar Rp.2.893.058.492,- sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

**Tabel III.2**  
**DATA KEGIATAN/SUB KEGIATAN TUNDA BAYAR TAHUN 2023**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

| NO            | NAMA KEGIATAN   | NAMA SUB KEGIATAN   | KODE REKENING     | URAIAN  | NO KONTRAK   | JUMLAH                  |
|---------------|---|---|-------------------|---|--|-------------------------|
| 1             | 2   | 3   | 4                 | 5   | 6  | 7                       |
| 1             | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 5.1.02.03.02.0036 | Pemeliharaan Alat Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang   | 002/SP/PPK-DISHUB/SUKU-CADANG/III/2023 Tanggal 29 Maret 2023         | 98.815.000,00           |
| 2             | Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan   | 5.1.02.01.02.0004 | Belanja Komponen-Komponen Rambu                                 | 050/KONTRAK/PPK-DISHUB/KOMPONENRAMBU/XI/2023 Tanggal 9 November 2023 | 59.925.000,00           |
| 3             | Pelaksanaan Menagemen dan Rekayasa lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 5.1.02.03.02.0492 | Pemeliharaan Pusat Kendali ATCS (CCROOM)                        | 21/Add01_SP/PPK-DISHUB/BPRRRLLDRB/II/2023 12 Desember 2023           | 647.650.000,00          |
| 4             | Pelaksanaan Menagemen dan Rekayasa lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 5.1.02.03.02.0492 | Relikasi APILL ATCS Kota Batam (Tiga Simpang dan Empat Simpang) | 16/SP/PPK-DISHUB/RelokasiAPILL/XI/2023 Tanggal 17 November 2023      | 1.168.673.000,00        |
| 5             | Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 5.1.02.03.02.0036 | Overhaul Bus Medium   | 43/SPK/BPAAD/PPK-DISHUB/X/2023 Tanggal 13 Oktober 2023               | 150.000.000,00          |
| 6             | Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 5.1.02.03.02.0036 | Rekondisi Bus Sekolah/ Bus Trans Batam                          | 39/SPK/BPAAD/PPK-DISHUB/X/2023 Tanggal 19 Oktober 2023               | 199.200.000,00          |
| 7             | Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 5.1.02.03.02.0036 | Operasional Peleyanan Transportasi Bus ekolah APBDP             | 37/SPK/BPAAD/PPK-DISHUB/X/2023 Tanggal 14 Oktober 2023               | 75.000.000,00           |
| 8             | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                              | Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal  | 5.2.03.01.01.0018 | Konsultan Pengawas Pembangunan Dermaga PontonNgenang            | 19/SP-ADD/DISHUB/PGWS-PNTN-NGNG/IX/2023 23 November 2023             | 57.975.300,00           |
| 9             | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                              | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal  | 5.2.03.01.01.0018 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Bulang Lintang         | 15/SP-ADD-3/DISHUB/RHB-BLT/IX/2023 Tanggal 18 Sempember 2023         | 435.820.192,00          |
| <b>Jumlah</b> |   |   |                   |   |  | <b>2.893.058.492,00</b> |

Penjelasan tambah kurang masing-masing sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, bertambah sebesar Rp.595.629.029,- pada penyusunan APBD 2024 dan bertambah sebesar Rp.1.059.261.845,- pada Perubahan RKPD 2024 karena ada penambahan Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan penyesuaian-penyesuaian tunjangan lainnya;

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, sebesar Rp. 184.320.000,- dipindahkan pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada penyusunan APBD 2024;
3. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dirasionalisasikan sebesar Rp.178.200.000,- pada penyusunan APBD 2024;
4. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dirasionalisasikan sebesar Rp.49.500.000,- pada penyusunan APBD 2024;
5. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dirasionalisasikan sebesar Rp.20.149.000,- pada penyusunan APBD 2024;
6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, bertambah sebesar Rp.30.000.000,- dari sub kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang merupakan pengadaan materai pada penyusunan APBD 2024;
7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dirasionalisasikan sebesar Rp.178.200.000,- pada penyusunan APBD 2024 dan bertambah sebesar

- Rp.44.266.000,- pada Perubahan RKPD 2024 karena adanya penambahan perjalanan dinas untuk eselon II, III dan IV;
8. Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur, dirasionalisasikan sebesar Rp.267.522.000,- pada penyusunan APBD 2024;
  9. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dirasionalisasikan sebesar Rp.457.271.000,- pada penyusunan APBD 2024;
  10. SubKegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik , dirasionalisasikan sebesar Rp.97.216.000,- pada penyusunan APBD 2024 dan bertambah sebesar Rp. 27.500.000,- pada Perubahan RKPD 2024 untuk sewa server dan paket data HT;
  11. SubKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dirasionalisasikan sebesar Rp.203.182.216,- pada penyusunan APBD 2024 dan dirasionalisasikan lagi sebesar Rp. 251.580.000,- pada Perubahan RKPD 2024 karena ada pegawai THL yang lulus P3K;
  12. SubKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, bertambah Rp.3.760.000,- pada Perubahan RKPD 2024 karena adanya penyesuaian pada biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan;
  13. SubKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, bertambah Rp.49.280.000,- pada

Perubahan RKPD 2024 karena adanya penyesuaian pada biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional;

14. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dirasionalisasikan sebesar Rp.38.000.000,- pada penyusunan APBD 2024;
15. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dirasionalisasikan sebesar Rp.61.380.000,- pada penyusunan APBD 2024;
16. SubKegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, bertambah sebesar Rp.3.757.018.504,- pada penyusunan APBD 2024 dan dirasionalisasikan sebesar Rp. 2.023.165.119,- pada Perubahan RKPD 2024 dikarenakan UPT Trans Batam tidak dapat mencapai target pendapatan sebagaimana yang ditetapkan pada awal tahun anggaran;
17. Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dirasionalisasikan sebesar Rp.427.591.600,- pada penyusunan APBD 2024;
18. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dirasionalisasikan sebesar Rp.575.280.200,- pada penyusunan APBD 2024;
19. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan dirasionalisasikan sebesar Rp.1.091.683.200,- pada penyusunan APBD 2024 dan ditambahkan sebesar Rp.164.793.000,- pada Perubahan RKPD 2024 yang diperuntukkan memelihara JPO yang terletak di SMKN 1 Batu Aji;

20. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, dirasionalisasikan sebesar Rp.250.057.000,- pada penyusunan APBD 2024;
21. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota, bertambah Rp.1.744.808.500,- pada penyusunan APBD 2024 dan dirasionalisasikan sebesar Rp.42.983.600,- pada Perubahan RKPD 2024;
22. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dirasionalisasikan sebesar Rp.350.000.000,- pada penyusunan APBD 2024 dan ditambahkan sebesar Rp.128.000.000,- pada Perubahan RKPD 2024 untuk pembelian server yang dipergunakan pada Pengujian Kendaraan Bermotor;
23. Sub Kegiatan Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS), bertambah sebesar Rp.2.089.500 ,- pada penyusunan APBD 2024;
24. Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, dirasionalisasikan sebesar Rp.2.833.545.700,- pada penyusunan APBD 2024 dan ditambahkan sebesar Rp.623.413.000,- untuk Relokasi APILL simpang 3 Batu Besar, Rp. 485.000.000,- untuk pembangunan Pelican Crossing di depan Kantor Walikota Batam, Rp.239.775.000 untuk pembangunan Marka Parkir dan

- dikurangi pengadaan *Road Barrier Beton* sebesar Rp. 97.465.000 pada Perubahan RKPD 2024;
25. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, dirasionalisasikan sebesar Rp.40.800.000,- pada penyusunan APBD 2024;
  26. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, ditambahkan sebesar Rp.8.984.077.738,- pada penyusunan APBD 2024 dan bertambah Rp.60.000.000,- pada Perubahan RKPD 2024 untuk BBM Bus anak sekolah Batalyon Marinir yang berlokasi di Barelang;
  27. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota, ditambahkan sebesar Rp.1.583.764.720,- pada penyusunan APBD 2024 untuk BBM 3 unit kapal hibah dari Kemensos yang diperuntukkan untuk anak sekolah diwilayah hinterland dan bertambah Rp.45.000.000,- untuk biaya pengurusan surat-surat kapal hibah Kemensos dan berkurang biaya docking speedboat sebesar Rp.10.000.000,- pada Perubahan RKPD 2024.

28. Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal, dirasionalisasikan sebesar Rp.6.790.312.000,- pada penyusunan APBD 2024;
29. Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal, dirasionalisasikan sebesar Rp.1.385.372.500,- pada penyusunan APBD 2024;

### **3.3. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan mengemban 3 (tiga) Program 15 (lima belas) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan. Berikut disampaikan tabel perubahan rencana kerja Dinas Perhubungan tahun 2024 sebagaimana yang telah diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri:

**TABEL III.3**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RENSTRA | Target 2024 |         | Pagu Indikatif |                |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana | Prioritas       |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2025 |                |
|------|--|--|---------------------------------------|-------------|---------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|
|      |  |  |                                       | Semula      | Menjadi | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                | Semula          | Nasional  |                     | Daerah                               | Target         |
| 2    | 15   |  |                                       |             |         |                | 85.669.027.924 | 86.978.544.499         | 90.376.458.117 |                |                 |   |                     |                                      | 82.338.918.719 |
| 2    | 15   | 1  |                                       |             |         |                | 29.171.163.448 | 31.910.581.765         | 30.918.719.491 |                |                 |   |                     | 100 %                                | 33.127.809.213 |
| 2    | 15   | 1  | 02.02                                 |             |         |                | 13.462.615.876 | 13.873.924.905         | 14.933.186.750 |                |                 |   |                     | 100 %                                | 14.578.107.613 |
| 2    | 15   | 1  | 02.02                                 | 1           |         |                | 13.278.295.876 | 13.873.924.905         | 14.933.186.750 | Kota<br>Batam  | DAU<br>&<br>PAD | Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>yang Unggul<br>dan<br>Bermartabat. |                     | 73 Orang                             | 14.578.107.613 |
| 2    | 15   | 1  | 02.02                                 | 3           |         |                | 184.320.000    | -                      | -              | Kota<br>Batam  |                 |   |                     | -                                    | -              |
| 2    | 15   | 1  | 02.05                                 |             |         |                | 227.700.000    | -                      | -              |                |                 |   |                     | -                                    | 138.188.000    |
| 2    | 15   | 1  | 02.05                                 | 2           |         |                | 178.200.000    | -                      | -              | Kota<br>Batam  |                 |   |                     | -                                    | -              |
| 2    | 15   | 1  | 02.05                                 | 9           |         |                | 49.500.000     | -                      | -              | Kota<br>Batam  |                 |   |                     | -                                    | 138.188.000    |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RENSTRA | Target 2024   |  | Pagu Indikatif |            |                        | Lokasi      | Sumber<br>Dana | Prioritas   |               | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2025  |            |                |
|------|--|--|---------------------------------------|---|--|----------------|------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|---------------------|---|------------|----------------|
|      |  |  |                                       | Semula  | Menjadi  | RKPD 2024      | APBD 2024  | RKPD 2024<br>Perubahan |             |                | Semula      | Nasional      |                     | Daerah  | Target     | Pagu Indikatif |
| 2    | 15   | 1  | 02.06                                 | KEGIATAN<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah   | Persentase Penyediaan<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah   | 100 %          | 100 %      | 100 %                  | 527.770.700 | 451.132.700    | 495.398.700 |               |                     |   | 100 %      | 443.809.300    |
| 2    | 15   | 1  | 02.06                                 | 1 SUB KEGIATAN<br>Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan         | 3 Paket        | 1 Paket    | 3 Paket                | 255.830.200 | 255.830.200    | 255.830.200 | Kota<br>Batam | PAD                 | Pembangunan<br>Infrastruktur,<br>Utilitas<br>Perkotaan dan<br>Sarana<br>Transportasi<br>yang merata,<br>berkualitas dan<br>berkesinambun<br>gan | 3 Paket    | 32.558.000     |
| 2    | 15   | 1  | 02.06                                 | 2 SUB KEGIATAN<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                                   | 5 Paket        | 5 Paket    | 5 Paket                | 103.292.500 | 83.143.500     | 83.143.500  | Kota<br>Batam | PAD                 |   | 5 Paket    | 89.083.000     |
| 2    | 15   | 1  | 02.06                                 | 4 SUB KEGIATAN<br>Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan   | 1 Paket        | 1 Paket    | 2 Paket                | 8.250.000   | 38.250.000     | 38.250.000  | Kota<br>Batam | PAD                 |   | 1 Paket    | 7.330.000      |
| 2    | 15   | 1  | 02.06                                 | 5 SUB KEGIATAN<br>Penyediaan Barang<br>Cetakan dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang disediakan                                      | 1 Paket        | 1 Paket    | 2 Paket                | 24.608.000  | 24.608.000     | 24.608.000  | Kota<br>Batam | PAD                 |   | 1 Paket    | 21.194.000     |
| 2    | 15   | 1  | 02.06                                 | 9 SUB KEGIATAN<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                           | 35 Laporan     | 35 Laporan | 25 Laporan             | 135.790.000 | 49.301.000     | 93.567.000  | Kota<br>Batam | PAD                 |   | 35 Laporan | 293.644.300    |
| 2    | 15   | 1  | 02.07                                 | KEGIATAN<br>Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah       | Persentase kebutuhan<br>barang milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah yang<br>terpenuhi | 100%           | 100 %      | 100 %                  | 834.647.000 | 109.854.000    | 109.854.000 |               |                     |   | 100 %      | 145.950.000    |
| 2    | 15   | 1  | 02.07                                 | 5 SUB KEGIATAN :<br>Pengadaan Mebeleur  | Jumlah Mebel yang<br>diadakan (Unit)   | 5 Unit         | 51 Unit    | 2 Unit                 | 303.876.000 | 36.354.000     | 36.354.000  | Kota<br>Batam | PAD                 |   | 22 Unit    | 84.700.000     |
| 2    | 15   | 1  | 02.07                                 | 6 SUB KEGIATAN<br>Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                  | Jumlah Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara   | 5 Unit         | 56 Unit    | 7 Unit                 | 530.771.000 | 73.500.000     | 73.500.000  | Kota<br>Batam | PAD                 |   | 48 Unit    | 61.250.000     |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RENSTRA | Target 2024  |  | Pagu Indikatif   |            |                        | Lokasi        | Sumber<br>Dana | Prioritas     |               | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2025 |        |                |               |               |
|------|--|--|---------------------------------------|--|--|--|------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|--------|----------------|---------------|---------------|
|      |  |  |                                       | Semula   | Menjadi  | RKPD 2024  | APBD 2024  | RKPD 2024<br>Perubahan |               |                | Semula        | Nasional      |                     | Daerah                               | Target | Pagu Indikatif |               |               |
| 2    | 15   | 1  | 02.08                                 | KEGIATAN<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                     | Persentase kebutuhan<br>jasa penunjang urusan<br>pemerintahan daerah<br>yang terpenuhi   | %  | 100%       | 100%                   | 2.865.038.376 | 2.564.640.160  | 2.340.560.160 |               |                     |                                      |        | 100 %          | 2.927.325.500 |               |
| 2    | 15   | 1  | 02.08                                 | 2  | SUB KEGIATAN<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik  | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik yang<br>Disediakan                 | 12 Laporan | 48 Laporan             | 12 Laporan    | 994.415.000    | 897.199.000   | 924.699.000   | Kota<br>Batam       | PAD                                  |        |                | 4 Laporan     | 940.503.500   |
| 2    | 15   | 1  | 02.08                                 | 4  | SUB KEGIATAN<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor<br>yang Disediakan                                      | 13 laporan | 13 Laporan             | 13 Laporan    | 1.870.623.376  | 1.667.441.160 | 1.415.861.160 | Kota<br>Batam       | PAD                                  |        |                | 12 Laporan    | 1.986.822.000 |
| 2    | 15   | 1  | 02.09                                 | KEGIATAN<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah | Persentase pemeliharaan<br>barang milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah yang<br>layak fungsi   | %  | 100 %      | 100 %                  | 917.610.000   | 818.230.000    | 970.085.000   |               |                     |                                      |        | 100 %          | 1.010.028.800 |               |
| 2    | 15   | 1  | 02.09                                 | 1  | SUB KEGIATAN :<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Perorangan atau Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya   | 1 Unit     | 1 Unit                 | 1 Unit        | 38.280.000     | 38.280.000    | 42.040.000    | Kota<br>Batam       | PAD                                  |        |                | -             | 38.280.000    |
| 2    | 15   | 1  | 02.09                                 | 2  | SUB KEGIATAN<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan       | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan yang Dipelihara<br>dan dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya | 98 Unit    | 98 Unit                | 63 Unit       | 599.350.000    | 599.350.000   | 747.445.000   | Kota<br>Batam       | PAD                                  |        |                | 89 Unit       | 729.798.800   |
| 2    | 15   | 1  | 02.09                                 | 6  | SUB KEGIATAN<br>Pemeliharaan Peralatan<br>dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara   | 85 Unit    | 61 Unit                | 85 Unit       | 78.600.000     | 40.600.000    | 40.600.000    | Kota<br>Batam       | PAD                                  |        |                | 6 Unit        | 59.550.000    |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RENSTRA | Target 2024 |   | Pagu Indikatif  |  |   | Lokasi  | Sumber<br>Dana        | Prioritas             |                       | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2025 |        |                |              |                       |   |
|------|--|--|---------------------------------------|-------------|---|---|--|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|--------|----------------|--------------|-----------------------|---|
|      |  |  |                                       | Semula      | Menjadi   | RKPD 2024   | APBD 2024  | RKPD 2024<br>Perubahan                                      |   |                       | Semula                | Nasional              |                     | Daerah                               | Target | Pagu Indikatif |              |                       |   |
|      |  |  |                                       |             |   |   |  |   |   |                       |                       |                       |                     |                                      |        |                |              |                       |   |
| 2    | 15   | 1  | 02.09                                 | 9           | SUB KEGIATAN<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya      | Jumlah Gedung Kantor<br>dan Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit   | 1 Unit  | 1 Unit  | 201.380.000           | 140.000.000           | 140.000.000           | Kota<br>Batam       | PAD                                  |        |                | 1 Unit       | 182.400.000           |   |
| 2    | 15   | 1  | 02.10                                 |             | <b>KEGIATAN<br/>Peningkatan Pelayanan<br/>BLUD</b>                                      | <b>Persentase Pelayanan<br/>BLUD</b>  | <b>100%</b>  | 100 %   | 100 %   | <b>10.335.781.496</b> | <b>14.092.800.000</b> | <b>12.069.634.881</b> |                     |                                      |        |                | <b>100 %</b> | <b>13.884.400.000</b> |   |
| 2    | 15   | 1  | 02.10                                 | 1           | SUB KEGIATAN<br>Pelayanan dan Penunjang<br>Pelayanan BLUD                               | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan Pelayanan<br>dan Penunjang Pelayanan  | 1 Unit Kerja   | 1 Unit Kerja  | 1 Unit Kerja  | 10.335.781.496        | 14.092.800.000        | 12.069.634.881        | Kota<br>Batam       | PAD                                  |        |                | 1 Unit Kerja | 13.884.400.000        |   |
| 2    | 15   | 2  |                                       |             | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>LALU LINTAS DAN<br/>ANGKUTAN JALAN<br/>(LLAJ)</b>    | 1. Persentase Sarana dan<br>Prasarana Perhubungan<br>yang terbangun<br>2. Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Perhubungan<br>yang terbangun<br>3. Jumlah Jukir yang<br>melaksanakan transaksi<br>non tunai<br>4. Persentase Kendaraan<br>Wajib Uji yang lulus uji<br>5. Persentase tingkat<br>pelayanan Operasional<br>Bus Trans Batam | 1. 100%<br>2. 5.211<br>Unit<br>3. 400<br>Orang<br>4. 80%<br>5. 63% | 1. 81%<br>2. 4.199 Unit<br>3. 200 Orang<br>4. 78%<br>5. 63% | 1. 81%<br>2. 4.199 Unit<br>3. 200 Orang<br>4. 78%<br>5. 63% | <b>37.345.152.912</b> | <b>42.507.170.950</b> | <b>46.368.151.350</b> |                     |                                      |        |                | 90 %         | <b>39.919.536.000</b> |   |
| 2    | 15   | 2  | 02.01                                 |             | <b>KEGIATAN<br/>Penetapan Rencana<br/>Induk Jaringan LLAJ<br/>Kabupaten/Kota</b>        |   |  | 100%  | 100%  | <b>900.000.000</b>    | <b>900.000.000</b>    | <b>900.000.000</b>    |                     |                                      |        |                |              |                       | - |
| 2    | 15   | 2  | 02.01                                 | 1           | SUB KEGIATAN<br>Pelaksanaan Penyusunan<br>Rencana Induk Jaringan<br>LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen<br>Penyusunan Rencana<br>Induk Jaringan LLAJ<br>Kabupaten/Kota   | 1 Dokumen  | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   | 900.000.000           | 900.000.000           | 900.000.000           |                     | PAD                                  |        |                | -            | -                     |   |
| 2    | 15   | 2  | 02.02                                 |             | <b>KEGIATAN<br/>Penyediaan<br/>Perlengkapan Jalan di<br/>Jalan Kabupaten/Kota</b>       | <b>Persentase<br/>perlengkapan jalan yang<br/>dibangun setiap<br/>tahunnya</b>  | <b>100 %</b>   | 100 %   | 100%  | <b>3.288.571.400</b>  | <b>943.959.400</b>    | <b>1.168.677.400</b>  |                     |                                      |        |                | <b>100 %</b> | <b>4.890.273.800</b>  |   |

| Kode           | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RENSTRA | Target 2024                      |            | Pagu Indikatif       |                      |                        | Lokasi        | Sumber<br>Dana | Prioritas |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2025 |                       |
|----------------|--|--|---------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|----------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|                |  |  |                                       | Semula                           | Menjadi    | RKPD 2024            | APBD 2024            | RKPD 2024<br>Perubahan |               |                | Nasional  | Daerah |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |
| 2 15 2 02.02 1 | SUB KEGIATAN<br>Pembangunan Prasarana<br>Jalan di Jalan<br>Kabupaten/Kota  | Jumlah Prasarana Jalan di<br>Jalan Kabupaten/Kota<br>yang Terbangun  | 7 Unit                                | 2 Unit                           | 2 Unit     | 631.201.200          | 203.609.600          | 203.609.600            | Kota<br>Batam | PAD            |           |        |                     | 4 Unit                               | 489.027.200           |
| 2 15 2 02.02 2 | SUB KEGIATAN<br>Penyediaan Perlengkapan<br>Jalan di Jalan<br>Kabupaten/Kota  | Jumlah Perlengkapan<br>Jalan di Jalan<br>Kabupaten/Kota yang<br>Tersedia   | 193 Unit                              | 281 Unit                         | 183 Unit   | 1.065.728.000        | 490.447.800          | 490.447.800            | Kota<br>Batam | PAD            |           |        |                     | 193 unit                             | 3.875.467.600         |
| 2 15 2 02.02 3 | SUB KEGIATAN<br>Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan Prasarana<br>Jalan  | Jumlah Prasarana Jalan<br>yang Terehabilitasi dan<br>Terpelihara   | 22 Unit                               | 11 Unit                          | 1 Unit     | 1.091.683.200        | -                    | 164.793.000            | Kota<br>Batam | PAD            |           |        |                     | 11 Unit                              | 253.901.000           |
| 2 15 2 02.02 4 | SUB KEGIATAN<br>Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan<br>Perlengkapan Jalan   | Jumlah Perlengkapan<br>Jalan yang Terehabilitasi<br>dan Terpelihara  | 82 Unit                               | 60 Unit                          | 10 Unit    | 499.959.000          | 249.902.000          | 309.827.000            | Kota<br>Batam | PAD            |           |        |                     | 81 Unit                              | 271.878.000           |
| 2 15 2 02.04   | <b>KEGIATAN<br/>Penerbitan Izin<br/>Penyelenggaraan dan<br/>Pembangunan Fasilitas<br/>Parkir</b>   | <b>Persentase titik parkir<br/>yang dikelola</b>   | <b>100%</b>                           | 91%                              | 91%        | <b>5.458.019.500</b> | <b>7.202.828.000</b> | <b>7.159.844.400</b>   |               |                |           |        |                     | <b>88 %</b>                          | <b>15.650.000.000</b> |
| 2 15 2 02.04 2 | SUB KEGIATAN<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Pengawasan<br>Pelaksanaan Izin<br>Penyelenggaraan dan<br>Pembangunan Fasilitas<br>Parkir Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi<br>dan Sinkronisasi<br>Pengawasan Pelaksanaan<br>Izin Penyelenggaraan dan<br>Terbangunnya Fasilitas<br>Parkir Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | 720<br>Laporan<br>(Titik<br>Lokasi)   | 658 Laporan<br>(Titik<br>Lokasi) | 12 Laporan | 5.458.019.500        | 7.202.828.000        | 7.159.844.400          | Kota<br>Batam | PAD            |           |        |                     | 688<br>Laporan                       | 15.650.000.000        |
| 2 15 2 02.05   | <b>KEGIATAN<br/>Pengujian Berkala<br/>Kendaraan Bermotor</b>   | <b>Persentase operasional<br/>pelayanan PKB</b>  | <b>73%</b>                            | 67%                              | 67%        | <b>960.074.000</b>   | <b>610.074.000</b>   | <b>738.074.000</b>     |               |                |           |        |                     | <b>80%</b>                           | <b>756.778.000</b>    |
| 2 15 2 02.05 1 | SUB KEGIATAN<br>Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana Pengujian<br>Berkala Kendaraan<br>Bermotor  | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pengujian<br>Berkala Kendaraan<br>Bermotor yang Tersedia  | 11 Unit                               | 11 Unit                          | 1 Unit     | 510.074.000          | 160.074.000          | 288.074.000            | Kota<br>Batam | PAD            |           |        |                     | 11 Unit                              | 54.687.000            |

| Kode           | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RENSTRA | Target 2024      |                  | Pagu Indikatif        |                       |                        | Lokasi        | Sumber<br>Dana | Prioritas |          | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2025 |                       |
|----------------|--|---|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|----------------|-----------|----------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|                |  |   |                                       | Semula           | Menjadi          | RKPD 2024             | APBD 2024             | RKPD 2024<br>Perubahan |               |                | Semula    | Nasional |                     | Daerah                               | Target                |
| 2 15 2 02.05 4 | SUB KEGIATAN<br>Penyediaan Bukti Lulus Uji<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor  | Jumlah Dokumen Bukti<br>Lulus Uji Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor   | 12.000<br>Dokumen                     | 5.000<br>Dokumen | 5.000<br>Dokumen | 125.000.000           | 125.000.000           | 125.000.000            | Kota<br>Batam | PAD            |           |          |                     | 12.000<br>Dokumen                    | 300.000.000           |
| 2 15 2 02.05 7 | SUB KEGIATAN<br>Pemeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Pengujian<br>Berkala Kendaraan<br>Bermotor  | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pengujian<br>Berkala Kendaraan<br>Bermotor yang Terpelihara  | 3 Unit                                | 2 Unit           | 2 Unit           | 325.000.000           | 325.000.000           | 325.000.000            | Kota<br>Batam | PAD            |           |          |                     | 4 Unit                               | 402.091.000           |
| 2 15 2 02.06   | <b>KEGIATAN<br/>Pelaksanaan Manajemen<br/>dan Rekayasa Lalu<br/>Lintas untuk Jaringan<br/>Jalan Kabupaten/Kota</b>   | <b>Persentase ketersediaan<br/>APILL di persimpangan<br/>jalan kota</b>   | <b>100%</b>                           | <b>8500%</b>     | <b>8500%</b>     | <b>8.312.627.400</b>  | <b>5.481.171.200</b>  | <b>8.548.217.200</b>   |               |                |           |          |                     | <b>75 %</b>                          | <b>6.887.319.200</b>  |
|                | SUB KEGIATAN :<br>Pembangunan Zona<br>Selamat Sekolah (ZoSS)   | Jumlah Terbangunnya<br>Zona Selamat Sekolah<br>(ZOSS)   | 1 Lokasi                              | 2 Unit           | 1 Unit           | 131.515.200           | 133.604.700           | 133.604.700            | Kota<br>Batam | PAD            |           |          |                     | -                                    | -                     |
| 2 15 2 02.06 2 | SUB KEGIATAN<br>Pengadaan, Pemasangan,<br>Perbaikan dan<br>Pemeliharaan<br>Perlengkapan Jalan dalam<br>rangka Manajemen dan<br>Rekayasa Lalu Lintas        | Jumlah Perlengkapan<br>Jalan dalam Rangka<br>Manajemen dan Rekayasa<br>Lalu Lintas yang<br>dilaksanakan pengadaan<br>dan Pemasangan | 4 Dokumen                             | 4 Dokumen        | 4 Dokumen        | 8.181.112.200         | 5.347.566.500         | 8.414.612.500          | Kota<br>Batam | PAD            |           |          |                     | 2 Unit                               | 6.887.319.200         |
| 2 15 2 02.08   | <b>KEGIATAN<br/>Audit dan Inspeksi<br/>Keselamatan LLAJ di<br/>Jalan</b>   | <b>persentase pelaksanaan<br/>operasi terpadu<br/>pengamanan penertiban<br/>lalu lintas</b>   | <b>100%</b>                           | <b>100 %</b>     | <b>100%</b>      | <b>194.400.000</b>    | <b>153.600.000</b>    | <b>153.600.000</b>     |               |                |           |          |                     | <b>100 %</b>                         | <b>412.687.000</b>    |
| 2 15 2 02.08 4 | SUB KEGIATAN<br>Pelaksanaan Inspeksi,<br>Audit dan Pemantauan Unit<br>Pelaksana Uji Berkala<br>Kendaraan Bermotor  | Jumlah Laporan Inspeksi,<br>Audit dan Pemantauan Unit<br>Pelaksana Uji Berkala<br>Kendaraan Bermotor                                | 90 Laporan                            | 40 Laporan       | 16 Laporan       | 194.400.000           | 153.600.000           | 153.600.000            | Kota<br>Batam | PAD            |           |          |                     | 90 Laporan                           | 412.687.000           |
| 2 15 2 02.09   | <b>KEGIATAN<br/>Penyediaan Angkutan<br/>Umum untuk Jasa<br/>Angkutan Orang<br/>dan/atau Barang Antar<br/>Kota dalam 1 (Satu)<br/>Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Cakupan pelayanan<br/>operasional Bus Trans<br/>Batam (Koridor)</b>  | <b>100%</b>                           | <b>100%</b>      | <b>100%</b>      | <b>18.231.460.612</b> | <b>27.215.538.350</b> | <b>27.699.738.350</b>  |               |                |           |          |                     | <b>90 %</b>                          | <b>11.322.478.000</b> |

| Kode |    |   |       | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RENSTRA   | Target 2024 |            | Pagu Indikatif |                |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana                          | Prioritas |          | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2025 |           |                |
|------|----|---|-------|--|--|---|-------------|------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|---|-----------|----------|---------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|
|      |    |   |       |  |  |   | Semula      | Menjadi    | RKPD 2024      | APBD 2024      | RKPD 2024<br>Perubahan |                |   | Semula    | Nasional |                     | Daerah                               | Target    | Pagu Indikatif |
| 2    | 15 | 2 | 02.09 | 1  | SUB KEGIATAN<br>Penyediaan Angkutan<br>Umum untuk Jasa<br>Angkutan Orang dan/atau<br>Barang Antar Kota dalam 1<br>(Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota  | Jumlah Angkutan Umum<br>untuk Jasa Angkutan<br>Orang dan/atau Barang<br>Antar Kota dalam 1 (Satu)<br>Daerah Kabupaten/Kota<br>yang Tersedia   | 48 Unit     | 48 Unit    | 48 Unit        | 18.231.460.612 | 27.215.538.350         | 27.699.738.350 | Kota<br>Batam                           | PAD       |          |                     |                                      | 62 Unit   | 11.322.478.000 |
| 2    | 15 | 3 |       |  | <b>PROGRAM<br/>PENGELOLAAN<br/>PELAYARAN</b>   | Tingkat aksesibilitas<br>masyarakat terhadap<br>transportasi laut   | 49          | 49 %       | 49 %           | 19.152.711.564 | 12.560.791.784         | 13.089.587.276 |   |           |          |                     |                                      | 49 %      | 9.291.573.506  |
| 2    | 15 | 3 | 02.06 |  | <b>KEGIATAN<br/>Penetapan Lintas<br/>Penyeberangan dan<br/>Persetujuan<br/>Pengoperasian Kapal<br/>dalam Daerah<br/>Kabupaten/Kota yang<br/>Terletak pada Jaringan<br/>Jalan Kabupaten/Kota<br/>dan/atau Jaringan Jalur<br/>Kereta Api<br/>Kabupaten/Kota</b>  | Persentasi pulau yang<br>terlayani oleh<br>transportasi laut  | 100%        | 100%       | 100%           | 2.072.630.064  | 3.656.394.784          | 3.691.394.784  |   |           |          |                     |                                      | 100%      | 1.659.040.000  |
| 2    | 15 | 3 | 02.06 | 2  | SUB KEGIATAN<br>Pengendalian dan<br>Pengawasan Jaringan<br>Lintas Penyeberangan dan<br>Persetujuan<br>Pengoperasian Kapal<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota yang<br>Terletak pada Jaringan<br>Jalan Kabupaten/Kota<br>dan/atau Jaringan Jalur<br>Kereta Api Kabupaten/Kota<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan<br>Pengendalian dan<br>Pengawasan Jaringan<br>Lintas Penyeberangan dan<br>Disetujuinya<br>Pengoperasian Kapal<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota yang<br>Terletak pada Jaringan<br>Jalan Kabupaten/Kota<br>dan/atau Jaringan Jalur<br>Kereta Api Kabupaten/Kota<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota | 12 Laporan  | 48 Laporan | 9 Laporan      | 2.072.630.064  | 3.656.394.784          | 3.691.394.784  | Kec.<br>Bulang<br>dan<br>Kec.<br>Galang | PAD       |          |                     |                                      | 2 Laporan | 1.659.040.000  |

| Kode         | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RENSTRA | Target 2024   |   | Pagu Indikatif   |           |                        | Lokasi         | Sumber<br>Dana | Prioritas     |               | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2025 |        |                |               |                       |
|--------------|--|--|---------------------------------------|---|---|--|-----------|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--|--------------------------------------|--------|----------------|---------------|-----------------------|
|              |  |  |                                       | Semula  | Menjadi   | RKPD 2024  | APBD 2024 | RKPD 2024<br>Perubahan |                |                | Semula        | Nasional      |  | Daerah                               | Target | Pagu Indikatif |               |                       |
| 2            | 15   | 3  | 02.12                                 | KEGIATAN<br>Pembangunan,<br>Penerbitan Izin<br>Pembangunan dan<br>Pengoperasian<br>Pelabuhan Pengumpan<br>Lokal | Persentase prasarana<br>perhubungan laut yang<br>dikelola dalam kondisi<br>baik | 100%   | 100 %     | 100 %                  | 17.080.081.500 | 8.904.397.000  | 9.398.192.492 |               |  |                                      |        | 100 %          | 7.632.533.506 |                       |
| 2            | 15   | 3  | 02.12                                 | 2   | SUB KEGIATAN<br>Pembangunan Pelabuhan<br>Pengumpan Lokal                        | Jumlah Pelabuhan<br>Pengumpan Lokal yang<br>Dibangun                   | 2 Unit    | 8 Unit                 | 3 Unit         | 15.375.258.400 | 8.584.946.400 | 8.642.921.700 | Kec.<br>Belakang<br>Padang<br>Kec.<br>Galang<br>Kec.<br>Bulang | PAD                                  |        |                | 2 Unit        | 6.938.692.000         |
| 2            | 15   | 3  | 02.12                                 | 3   | SUB KEGIATAN<br>Pengoperasian dan<br>Pemeliharaan Pelabuhan<br>Pengumpan Lokal  | Jumlah Pelabuhan<br>Pengumpan Lokal yang<br>Beroperasi dan Terpelihara | 8 Unit    | 4 Unit                 | 2 Unit         | 1.704.823.100  | 319.450.600   | 755.270.792   | Kec.<br>Belakang<br>Padang                                     | PAD                                  |        |                | 8 Unit        | 693.841.506           |
| <b>TOTAL</b> |  |  |                                       |   |   |  |           |                        |                |                |               |               |  |                                      |        |                |               | <b>82.338.918.719</b> |

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Batam disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kota Batam Tahun 2024 dan RKPD Perubahan Kota Batam Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

#### **4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kota Batam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
  - a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;

- b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

#### **4.2 Rencana Tindak Lanjut.**

Rencana Tindak lanjut Dinas Perhubungan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur Perhubungan;
2. Meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait sarana dan prasarana Perhubungan;
3. Mengembangkan transportasi umum massal yang aman dan nyaman, agar masyarakat lebih menyukai menggunakan transportasi umum;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan;

**WALI KOTA BATAM**

**MUHAMMAD RUDI**

**Formulir E.70**  
**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**

| No    | Jenis Kegiatan  | Hasil Pengendalian dan Evaluasi |           |   |   |
|-------|---|---------------------------------|-----------|---|---|
|       |   | Kesesuaian                      |           | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian              | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
|       |   | Ada                             | Tidak Ada |   |   |
| (1)   | (2)   | (3)                             | (4)       | (5)   | (6)                                       |
| 1.    | Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda   |                                 |           |   |   |
| 2.    | Pengolahan data dan informasi.  | Ada                             |           |   |   |
| 3.    | Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.  | Ada                             |           |   |   |
| 4.    | Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota.  | Ada                             |           |   |   |
| 5.    | Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.   | Ada                             |           |   |   |
| 6.    | Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.  |                                 | Tidak Ada | Tidak merupakan tahapan dalam Perubahan Renja | Tidak Ada                                 |
| 7.    | Perumusan tujuan dan sasaran.   | Ada                             |           |   |   |
| 8.    | Penelaahan usulan masyarakat.   | Ada                             |           |   |   |
| 9.    | Perumusan kegiatan prioritas.   | Ada                             |           |   |   |
| 10.   | Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.  |                                 | Tidak Ada | Tidak merupakan tahapan dalam Perubahan Renja | Tidak Ada                                 |
| 10.a. | Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.   |                                 | Tidak Ada | Tidak merupakan tahapan dalam Perubahan Renja | Tidak Ada                                 |
| 10.b. | Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.               | Ada                             |           |   |   |
| 10.c. | Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.  | Ada                             |           |   |   |
| 10.d. | Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota. | Ada                             |           |   |   |
| 11.   | Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.                                  | Ada                             |           |   |   |

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BATAM**



**SALIM, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
**NIP.19681021 199010 1 001**



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 3 Telp. (0778) 459503 Fax. (0778) 452826 Kota Batam - 29433

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**

**Nomor : 1359/KU.00.00/XII/2022**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2024  
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2023  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021-2026, perlu disusun dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023;
- b. bahwa apabila dalam pelaksanaan Rencana Kerja dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka Dinas Perhubungan diwajibkan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja setiap tahunnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 Dinas Perhubungan Kota Batam dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 Dinas Perhubungan Kota Batam, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023;
  - b. Menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 tahapan dan tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam  
Pada tanggal 5 Desember 2022



LAMPIRAN : SK kepala Dinas Perhubungan  
 NOMOR : 1359/HB.00.01/XII/2022  
 TANGGAL : 5 Desember 2022

| NO     | JABATAN  | JABATAN DALAM TIM                                      |
|--------|--|--|
| I.     | KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM                | KETUA TIM  |
| II.    | SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM            | SEKRETARIS TIM   |
| III.   | KEPALA BIDANG LALU LINTAS                          | KETUA POKJAI BIDANG PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS |
| III.1. | KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS    | ANGGOTA  |
| III.2. | KEPALA SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS               | ANGGOTA  |
| III.3. | KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN LALU LINTAS | ANGGOTA  |
| III.4. | KA. UPTD PELAYANAN JASA TRANSPORTASI               | KOORDINATOR  |
| III.5. | KA. TU UPTD PELAYANAN JASA TRANSPORTASI            | ANGGOTA  |
| III.6. | STAF BIDANG LALU LINTAS                            | ANGGOTA  |
| III.7. | STAF UPTD PELAYANAN JASA TRANSPORTASI              | ANGGOTA  |
| IV.    | KEPALA BIDANG LAUT                                 | KETUA POKJAI II BIDANG EVALUASI                        |
| IV.1.  | KEPALA SEKSI PENUNJANG KESELAMATAN PELAYARAN       | ANGGOTA  |
| IV.2.  | KEPALA SEKSI KEPELABUHANAN                         | ANGGOTA  |
| IV.3.  | KEPALA SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT             | ANGGOTA  |
| IV.4.  | KASUBAG KEUANGAN                                   | ANGGOTA  |
| IV.5.  | STAF BIDANG LAUT                                   | ANGGOTA  |
| V.     | KEPALA BIDANG ANGKUTAN JALAN                       | KETUA POKJAI III BIDANG STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN    |
| V.1.   | KEPALA SEKSI ANGKUTAN BARANG                       | ANGGOTA  |
| V.2.   | KEPALA SEKSI ANGKUTAN ORANG                        | ANGGOTA  |
| V.3.   | KEPALA SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR          | ANGGOTA  |
| V.4.   | KEPALA UPTD PELAYANAN PARKIR                       | ANGGOTA  |
| V.5.   | KEPALA TU UPTD PELAYANAN PARKIR                    | ANGGOTA  |
| V.6.   | STAF ANGKUTAN JALAN                                | ANGGOTA  |
| V.7.   | STAF UPTD PELAYANAN PARKIR                         | ANGGOTA  |

| NO    | JABATAN   | JABATAN DALAM TIM  |
|-------|---|--|
| VI.   | KEPALA BIDANG PRASARANA PERHUBUNGAN                   | KETUA POKJA IV BIDANG RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN |
| VI.1. | KEPALA SEKSI PRASARANA ANGKUTAN LAUT                  | ANGGOTA  |
| VI.2. | KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS                       | ANGGOTA  |
| VI.3. | KEPALA SEKSI PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | ANGGOTA  |
| VI.4. | KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN                         | ANGGOTA  |
| VI.5. | KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM                          | ANGGOTA  |
| VI.6. | STAF BIDANG PRASARANA PERHUBUNGAN                     | ANGGOTA  |
| VI.7. | STAF SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN                    | ANGGOTA  |

**KEPALA DINAS**



**SALIM, S.Sos., M.Si.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19681021 199010 1 001